



**MEMETAKAN ALIRAN  
AKTIVISME DIGITAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ SEBUAH  
PERGERAKAN SOSIAL**

Penulis

Darasti Zahira

Habibah Hermanadi

Editor

Dirgayuza Setiawan, M.Sc

Nabeel Khawarizmy Muna

Desain Cover dan Tata Letak

Ristyanadya Laksmi Gupita



## Pendahuluan

Dalam kebangkitan era kemajuan digital, muncul gelombang politik alternatif yang baru. Keterlibatan politik di luar gelanggang anggota parlemen formal sudah ada dalam masyarakat demokratis jauh sebelum revolusi digital. Akan tetapi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah arena kegiatan aktivisme. Dengan adanya internet, warga negara dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik lebih banyak dari sebelumnya.

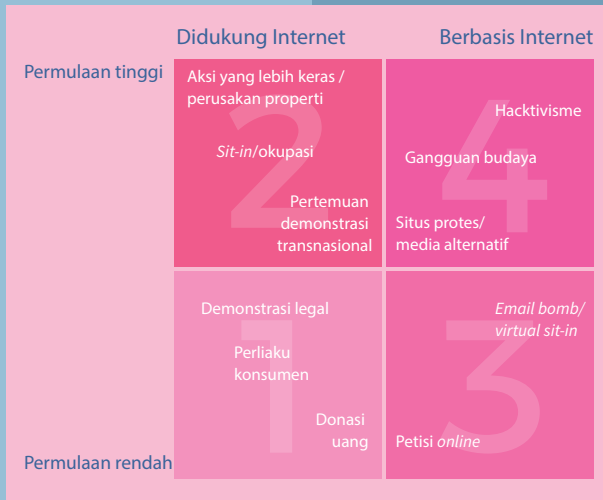
Seseorang yang telah dipilih untuk mundur dari arena politik formal kemudian memusatkan kembali cara keterlibatan mereka dari perubahan sosial menyeluruh ke isu-isu sosial tertentu. Ideologi-ideologi tradisional tidak lagi mempengaruhi politik alternatif, namun justru nilai-nilai personal. Sehingga definisi politik di era digital menjadi lebih ‘cair’—pengertian dari aktivisme sendiri menjadi berubah-ubah dan hingga saat ini masih terus dalam proses redefinisi. Keterlibatan politik sekarang sudah menjadi bagian penting dalam identitas individu. Identitas politik ini kemudian bersifat dinamis, terus berkembang ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai struktur sosial, perubahan budaya, dan urusan pribadi.<sup>i</sup>

Mitu dan Vega memberikan definisi aktivis modern sebagai seseorang yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap komunitas. Sebuah aktivisme kemudian menjadi aktivisme digital—atau yang juga dikenal sebagai aktivisme internet atau e-aktivisme—ketika internet digunakan untuk komunikasi, kampanye dan/atau memobilisasi sebuah isu sosial.<sup>ii</sup>

Dengan menggunakan metode *desk research*, studi ini bertujuan untuk menangkap perbedaan dari aliran aktivisme digital antara negara maju dan berkembang dengan menunjukkan berbagai macam pergerakan aktivisme digital dalam skala global. Studi ini akan membandingkan praktik dari aktivisme digital di empat kawasan G-20—dua negara maju dan dua negara berkembang—yang mempresentasikan perekonomian di negara maju maupun negara berkembang. Keempat negara ini adalah Brazil, Uni Eropa, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Berdasarkan studi komparatif dari keempat kawasan, kita akan melihat seberapa penting dan berpengaruhnya aktivisme digital.

# Aksi Aktivisme Digital

Berkat adanya internet, banyak organisasi pergerakan sosial telah menjadi transnasional, atau memiliki kemampuan lebih untuk mengubah bentuk organisasinya menjadi sebuah organisasi transnasional. Meskipun aksi aktivisme digital telah semakin mengglobal, implementasi dari aktivisme digital masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat kontekstual, antara lain politik, ekonomi, dan sosial, misalnya. Metode umum dari aktivisme digital termasuk petisi daring, email bombings, virtual sit-ins, hacktivism, serangan DOS (Denial of Service), aktivisme tagar, dan advokasi penggunaan open source.<sup>iii</sup> Van Laer dan Aeist menggambarkan 2 kategori dari aktivisme digital: berbasis internet dan didukung internet (lihat Gambar 1). “Aktivisme berbasis internet” adalah kegiatan ‘virtual’ yang lebih baru dibandingkan dengan bentuk “aktivisme dengan dukungan internet” yang merupakan kegiatan ‘fisik’ atau bentuk aktivisme tradisional, namun difasilitasi oleh internet.



Gambar 1 – Tipologi repertoar aksi digital baru<sup>iv</sup>.

Metode manapun yang digunakan, tiga elemen dari aktivisme digital yang akan memberikan dampak berarti dalam masyarakat adalah: integrasi, metode mendengarkan sebelum terlibat, dan perubahan dari interaksi online ke interaksi offline. Tindakan online dan offline melengkapi satu sama lain, dan organisasi pergerakan sosial saat ini hampir selalu menggunakan kedua tindakan tersebut. ‘Aktivis yang tepat secara digital’ mengikutsertakan offline untuk menunjukkan bahwa kelompok mereka benar-benar terdiri atas orang yang ‘nyata’. Internet juga membantu dalam penyebaran informasi mengenai bagaimana melaksanakan demonstrasi dengan aman

dan sukses, meskipun itu tidak akan menurunkan beberapa halangan praktis secara signifikan.<sup>v</sup> Selain itu perlu juga dicatat bahwa beragam fitur media sosial harus digunakan untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan, misalnya apabila hanya menggunakan satu jenis media sosial saja, contohnya Twitter saja, tidak akan cukup.<sup>vi</sup>

## Pentingnya Aktivisme Digital

Van de Monk menyebutkan bahwa ‘protes adalah aksi politik dari golongan yang tidak berdaya’, dan pada taraf tertentu, aktivisme merupakan salah satu cara untuk menyalurkan protes politik dan aspirasi masyarakat. Hal ini meningkatkan aspirasi warga negara dan memperkecil hirarki sosial tradisional antara golongan atas dan kelompok pemrotes. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan ruang tidak hanya untuk partisipasi politik warga negara, namun juga memberikan ruang bagi diskusi politik, mengingat interaksi yang komunikatif adalah sangat penting dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, aktivisme digital telah memberikan ruang untuk demokrasi yang meningkat tinggi lebih dari sebelumnya.

Keuntungan lain dari internet untuk political engagement adalah kemampuan untuk mengatasi halangan berupa keterbatasan dana, dimana internet menyediakan platform secara virtual dengan cuma-cuma. Penyebaran informasi juga dapat berjalan dengan segera dan real-time, menghasilkan koordinasi yang lebih lancar dan mobilisasi dari organisasi dalam skala global. Ruang dan waktu juga tidak lagi menjadi halangan, saat ini aktivis tidak perlu lagi berada di lokasi geografis yang sama untuk membuat aksi untuk isu yang sama.

Bagi politik alternatif, internet telah menjadi ruang melawan hegemoni dimana warga negara dan kelompok pergerakan dapat bebas dari narasi yang dibawa oleh media mainstream. Internet juga memberikan kesempatan bagi penyebaran informasi yang biasanya akan ditekan oleh media mainstream. Van de Donk juga berargumentasi bahwa organisasi pergerakan sosial bisa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan partai politik untuk membentuk opini publik. Pemimpin politik atau perusahaan dapat bertanggung jawab setiap saat, karena teknologi saat ini memungkinkan dokumentasi di tempat dari setiap peristiwa penting. Hal ini menguntungkan organisasi pergerakan sosial dalam menjalankan demonstrasi dengan lancar, karena aliran informasi yang cepat dapat mengurangi pengawasan pemerintah secara signifikan.<sup>vii</sup>





## Batasan-batasan Aktivisme Digital

Selalu ada dilema klasik terkait kesenjangan digital; warga negara tanpa akses internet masih tidak dapat berpartisipasi dalam aktivisme digital. Bahkan mereka yang memiliki akses, tapi tidak diikuti dengan keterampilan literasi digital, mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari partisipasi politik alternatif. Jika kesenjangan sosial terkait akses terhadap teknologi digital dan literasi digital tetap ada, kelompok masyarakat yang lebih sejahtera dan berpendidikan menjadi satu-satunya yang diuntungkan dengan adanya internet. Jangan lupa juga beberapa kawasan tertentu di dunia yang mungkin tidak memiliki kebebasan digital yang besar dikarenakan ketatnya sensor dari pemerintah negaranya. Jadi dalam kasus ini, internet tetap merupakan sebuah ruang hegemoni.<sup>viii</sup> Tanpa kebebasan dalam internet, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi terhadap perubahan sosial ataupun politik.<sup>ix</sup>

Di seluruh dunia, terbagi berbagai jenis dan tingkatan kebebasan dalam internet, terutama sebagai platform politik bagi masyarakat. Dalam internet, kita seharusnya dapat berbagi suara yang biasanya akan ditekan oleh media mainstream, tapi terdapat pula argumen mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.<sup>x</sup> Teknologi mungkin mengubah dan memfasilitasi budaya aktivisme, namun tidak dapat menggantikan interaksi fisik dan partisipasi. Untuk sebagian warga negara, politik alternatif mungkin tidak akan dianggap sebagai suatu yang dapat dipercaya sebagaimana politik tradisional. Pemegang kekuasaan juga mempertanyakan komitmen dari aktivisme digital, seperti dalam beberapa kasus hal itu dijadikan sebagai 'aktivisme keyboard' atau 'slacktivism'.<sup>xi</sup> Anggota pergerakan sosial tidak selalu tetap terlibat secara permanen dengan penyebab offline, atau bahkan online. Jadi, membuktikan komitmen dan membangun koneksi kuat serta berkelanjutan dengan pemerintah atau jaringan aktivisme tidak mungkin hanya dengan internet saja.

Internet mungkin saja tidak sebebaskan yang kita pikirkan, sumber daya dan ketrampilan tertentu masih diperlukan untuk keterlibatan online. Aktivis perlu untuk memiliki pengetahuan dalam aktivisme digital, terutama mempekerjakan personel untuk mengoperasikan TIK, koding dan pembangunan software, perangkat lunak dan bahkan pengetahuan terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya peretasan. Terdapat pula biaya sehubungan dengan partisipasi praktis, terutama dalam kasus demonstrasi global dimana bepergian sangat penting bagi anggota non-lokal. Dalam kasus aktivitas tingkat tinggi, pendanaan darurat juga diperlukan untuk biaya apabila terjadi penangkapan oleh polisi dan perangkat hukum, sebagai bagian dari konsekuensi menjadi aktivis; termasuk aktivis digital.<sup>xii</sup>

# Aktivisme Digital di Brazil

Brazil memiliki jumlah populasi yang besar dan jumlah pengguna internet yang relatif tinggi. Pada tahun 2012 saja, terdapat paling tidak 65 juta pengguna Facebook di Brazil, membuat negara tersebut menjadi pasar terbesar di luar Amerika Serikat. Brazil juga dikenal sebagai satu dari lima besar negara yang memiliki pengguna paling aktif Twitter.<sup>xiii</sup> Tingginya keterlibatan internet dan aktivitas digital mengarah pada terbentuknya lingkungan digital nasional dengan konektivitas tinggi di antara orang-orangnya. Jadi, aktivisme digital menjadi tren politik dari Brazil. Salah satu isu yang menarik perhatian Aktivis Digital Brazil adalah perihal kasus korupsi dalam pemerintahan Brazil. Strategi yang digunakan oleh aktivis bervariasi, termasuk mengorganisasi massa untuk demonstrasi, penyebaran meme politik, petisi, dan banyak lainnya.

Pada tahun 2009, untuk menyuarakan aspirasi terkait seberapa korupnya Kongres dan bagaimana peran dari Kongres tidaklah substansial secara konstitusional, sebuah inisiasi kampanye yang dikenal sebagai Gerakan Brazil menentang Korupsi Elektoral atau Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) didirikan. Gerakan ini diatur oleh organisasi nonpemerintah yang mengoordinasi 50 organisasi masyarakat sipil untuk meluncurkan koleksi tanda tangan sebagai dukungan inisiatif masyarakat demi meningkatkan profil dari kandidat yang mencalonkan diri untuk kantor legislatif.<sup>xiv</sup> Hal ini monumental, karena sejak September 2009 MCCE mengumpulkan paling tidak 1.5 juta tanda tangan fisik yang melebihi tanda tangan minimal yang diperlukan untuk memperkenalkan Hukam Warga Negara menentang Kongres. Selain tanda tangan fisik, MCCE juga menyertakan petisi online menyerukan Ficha Limpa Bill atau Clean State Bill untuk disahkan oleh Kongres, dan petisi tersebut mendapat lebih dari 2 juta tanda tangan. Kelompok tersebut menggunakan Avaaz.org, sebuah organisasi advokasi yang mempromosikan aktivisme sipil. Puncak dari upaya ini adalah ketika media menangkap isu tersebut, dan perhatian tersebut memungkinkan penyebaran pesan ini yang memperkuat relevansi pertanyaan di antara masyarakat Brazil. Pada Juni 2010, Presiden Lula Da Silva meratifikasi undang-undang tersebut setelah disetujui oleh Kongres.<sup>xv</sup>

Akan tetapi, terlepas dari keberhasilan kampanye pada 2010, masih ada subyek yang harus diperhatikan terkait dengan mobilisasi orang dan aktivisme digital melalui media sosial di Brazil. Pada tahun 2013, sebuah protes menentang kenaikan biaya bus menjadi viral. Sebuah protes digital tersebut mampu menggerakkan massa untuk berkumpul dan berakhir dengan bentrokan hebat antara polisi militer dan pemrotes. Protes serupa berkali-kali terjadi, dengan protes 2014 menentang Piala

Dunia yang mengakibatkan korban kritis disebabkan oleh penggunaan paksaan menjadi satu contoh yang paling dipublikasikan.<sup>xvi</sup> Untuk memastikan dan menghindari kerusuhan sosial, Badan Intelijen Pusat Brazil diizinkan untuk memonitor aktivitas digital dari rakyat dan politisi. Terlebih lagi, program pengawas memungkinkan polisi untuk menangkap mahasiswa yang laman Facebooknya memiliki asosiasi dengan Black Bloc. Dasar-dasar Black Bloc mengacu pada pernyataan dari versi ideologi politik anarkis mereka melalui perusakan properti publik dan pribadi.<sup>xvii</sup>


Muggah menjelaskan sifat dari digital native Brazil; bagaimana mereka terhubung ke jaringan dan tidak puas oleh ideologi yang berlaku mengenai hierarki dengan skema top-down atau atas-bawah di pemerintahan yang sangat rigid.<sup>xviii</sup> Sebagai reaksi akan hal tersebut, pemerintah Brazil telah mengesahkan lebih banyak undang-undang terkait sensor. Rancangan undang-undang regresif mengubah ruang maya menjadi subyek keamanan negara (dan salah satu rancangan undang-undang yang diperdebatkan) adalah PL 215/2015 atau Big Spy Bill. Jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, akan ada prasyarat bagi masyarakat Brazil untuk memberikan informasi personal seperti alamat rumah dan nomor telepon ketika mengunjungi sebuah situs, dan hal tersebut mengizinkan pemerintah untuk mengatur situasi atas nama ancaman keamanan negara.<sup>xix</sup> Terlebih lagi, dalam kasus Brazil, kelompok aktivis digital menemukan legitimasi melalui pergerakan mereka untuk akhirnya menyebabkan reaksi politik. Meskipun mengundang reaksi keras dari pemerintah, kelompok tersebut berkembang dengan pesat melalui jejaring yang telah terbangun tersebut untuk menyatukan isu-isu yang penting bagi masyarakat Brazil. Bahkan, dapat dilihat bahwa aktivisme digital ternyata dapat dan telah mempengaruhi dinamika partisipasi politik dan perubahan legislatif serta perjuangan untuk menangani isu-isu sosial yang sama.

## Aktivisme Digital di Uni Eropa

Tren aktivisme digital di Uni Eropa merupakan subyek studi sejak satu dekade terakhir—sejak tanda-tanda politisasi komunal dari internet dimulai pada 2005—dan ini sudah menjadi bagian dari studi yang sedang berlangsung mengenai tanda-tanda digital aktivisme kontemporer sebelumnya. Tidak seperti kasus lain yang digunakan dalam penelitian ini, Uni Eropa merupakan institusi supranasional, sehingga ketika kita bicara tentang Uni Eropa, maka kesemua anggota negaranya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sehingga, sifat terintegrasi dari institusi







berbicara lebih banyak atas kompleksitas dari aktivisme digital di kawasan Eropa. Kompleksitas tersebut terlihat dengan baik karena internet menjadi satu ruang yang digunakan oleh semua individu dari seluruh negara anggota Uni Eropa.

Pada tahun 2005, Perlemen Eropa menolak sebuah instruksi mengenai paten penemuan berdasarkan penerapan komputer yang memicu reaksi dari pergerakan Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS); sebuah pergerakan yang terdiri atas koalisi aktivis yang menentang kemungkinan instruksi Software Patent.<sup>xx</sup> Melalui kampanye No-Software Patent, koalisi tidak hanya mengambil bagian dalam lobi yang intensif dan panjang, tetapi juga dalam sifat alami badan supranasional Uni Eropa yang memperlihatkan kesamaan yang mencolok dengan jaringan advokasi transnasional yang sudah ada. Dari kampanye No-Software Patents, Sikkink dan Neck menunjukkan seberapa relevan aktor dapat bekerja bersama menentang birokrasi dan sistem pembuatan kebijakan Parlemen Eropa yang kaku pada sebuah isu dengan nilai yang sama.<sup>xxi</sup>

Setelah penolakan instruksi pada tahun 2005, di tahun 2009 parlemen mengusulkan ‘Telecoms Package’ yang merupakan sebuah set aturan yang terdiri dari lima instruksi mengatur pasar telekomunikasi Eropa. Menurut banyak orang, ini adalah awal dari politik kekayaan intelektual, dimana kelompok aktivis berjuang atas keberadaan perangkat lunak bebas dan terbuka dengan produksi teman sebaya berdasarkan kesamaan melalui jaringan online yang menghadihi transparansi, distribusi secara cuma-cuma, dan akses terbuka untuk informasi serta pengetahuan.<sup>xxii</sup> Dalam kasus ini, Breindl menekankan bahwa keberadaan koalisi aktivis menggambarkan aktivisme berbasis internet dibawa oleh oposisi dari reformasi properti intelektual saat ini. Hal ini mengganggu proses pembuatan hukum parlemen di tingkat nasional dan Eropa, serta membawa pengaruh besar pada pembuatan kebijakan di kawasan secara umum.<sup>xxiii</sup>

Strategi mereka dalam memenangkan kampanye berbeda-beda, dan salah satunya adalah melalui pembentukan organisasi nonprofit seperti Electronic Frontier Foundation (EFF, US) atau Open Right Group (ORG, UK). Yang lainnya merupakan asosiasi de facto seperti QdN (kelompok kerja penyimpangan data Jerman), AK Vorrat (kelompok budaya bebas Spanyol), dan eXgae (sekarang la-Ex) yang merupakan klaster internet Swedia Telecomix/WeRebuild. Sebagai tambahan



dari pembentukan kelompok-kelompok tersebut, mereka bersatu dalam penunjukkan representatif legal berbayar untuk merepresentasikan kasus bagi mereka. Kelompok-kelompok ini memberikan informasi penting dan memobilisasi massa untuk para pemimpin kampanye. Bagian lain dari strategi mereka mengikutsertakan prinsip peretasan dan juga sumber perangkat lunak yang terbuka dan bebas.<sup>xxiv</sup> Terdapat tiga kriteria yang dapat diamati yang menjadi dasar kesuksesan mereka dalam melakukan kampanye. Pertama, mereka mampu mengejar tujuan politik yang jelas dalam usahanya untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa dalam respon yang lulus dan netralitas bersih selama kampanye ‘Telecoms Package’.<sup>xxv</sup> Kedua, mereka mampu untuk menyuarakan diri mereka dari sudut pandang masyarakat sipil, oleh karena itu mereka tidak akan secara langsung diuntungkan dari kebijakan yang diadopsi.<sup>xxvi</sup> Terakhir, mereka mampu terlibat secara terpusat dalam kampanye organisasi, bertindak sebagai pemimpin atau pengusaha pergerakan dengan posisi tawar yang kuat dan komitmen pada maksud/alasan/penyebab.<sup>xxvii</sup>

Satu perbedaan khusus dari seluruh kampanye yang membedakan kampanye ini dengan kampanye lain adalah sentralisasi isu pada internet dalam proyek aktivisme ini, bertentangan dengan penggunaan sosial media secara dominan. Kampanye ini terbatas untuk kelompok-kelompok aktivis tertentu yang memberikan perhatian pada isu hak kekayaan intelektual dan merupakan subyek dari debat serta advokasi hanya dalam skala yang lebih kecil. Meskipun demikian, dampak yang berusaha diraih oleh kelompok sangatlah signifikan dalam kebijakan dibandingkan dengan mendapatkan kesadaran atau penerimaan sosial saja. Hal ini terlihat sangat strategis secara politik, sehingga berkompromi mengenai rentang waktu lebih panjang yang dibutuhkan untuk memenuhi kompleksitas pemerintahan multi-level secara alami bergantung pada sistem Uni Eropa.

## Aktivisme Digital di Afrika Selatan

Pertama-tama, untuk menilai tren aktivisme digital di Afrika, sangatlah penting untuk memahami bahwa kawasan tersebut masih menghadapi tantangan untuk memprediksi atau menilai jangkauan media sosial dalam membuat politik alternatif dan bagaimana hal tersebut memfasilitasi perubahan sosial.<sup>xxviii</sup> Oleh karena itu, menggunakan Afrika untuk kasus tertentu akan membantu kita menggambarkan jenis strategi yang menggarisbawahi perbedaan dimensi politik Afrika dan bagaimana negara tersebut bereaksi pada perubahan yang dibawa oleh teknologi. Dalam kasus kampanye digital ‘Rhodes Must Fall’ (#RMF) pada tahun 2015, sebuah

subyek dari aktivisme digital kontemporer melalui Twitter di Afrika Selatan, peran dari pemuda sangatlah penting dalam keberhasilan agenda mereka.<sup>xxix</sup>

Aksi mengambil patung Cecil John Rhodes yang mewakili keberadaan sejarah apartheid dan kolonisasi merupakan tindakan simbolik. Sedangkan gambaran yang lebih besar tentang aktivitas tersebut adalah terkait pada dekolonisasi sistem pendidikan Afrika Selatan. Aksi simbolik tersebut menunjukkan keprihatinan yang berkembang dari para pelajar terkait diskriminasi sistemik yang condong dalam sebuah bentuk politik berbasis ras. Melalui narasi dan nuansa dari perlawanan yang disuarakan, Bickford tertarik pada bagaimana sosial media dalam konteks ini mampu dilihat sebagai ruang dimana pendirian teguh dan kenyamanan yang intim antara warga negara dapat berdampingan. Jadi, keterlibatan ini menghasilkan sejenis 'warm impersonality' yang merupakan hal pokok bagi kemungkinan terciptanya politik demokratis dalam sebuah pemerintahan yang beragam dan memiliki banyak tingkatan.<sup>xxx</sup>

Mellon Media dan Citizenship Project merilis sebuah data yang menarik di tahun 2013 yang dengan jelas memperlihatkan kurangnya minat dari anak muda terhadap aktivitas politik. Penelitian yang dilakukan oleh Garnan dan Asserman ini menemukan bahwa partisipasi dalam kegiatan sipil atau sosial lebih disukai daripada kegiatan politik.<sup>xxxi</sup> Kemudian, popularitas sosial media mulai mewarnai kancah politik di Afrika Selatan, terutama di sekitar anak muda yang semakin bebas dalam menyuarakan diri dan mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini agaknya menjadi tantangan dalam kasus transisi negara demokratis seperti Afrika Selatan, karena media mainstream jarang memasukkan hal tersebut dalam perdebatan politik sosial, atau ekonomi disebabkan oleh hubungan yang pernah dijalin dengan pemerintah.<sup>xxxii</sup> Bertentangan dengan posisi media lokal negara, media internasional mungkin dapat mengangkat isu tersebut ke permukaan, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan legitimasi politik. Namun, di sisi lain hal ini menjelaskan alasan mengapa keterlibatan politik tidak terlihat sebagai suatu hal yang menarik bagi anak muda sehubungan dengan kurangnya visibilitas dalam media sehari-hari. Meskipun demikian, anggota dan pendukung dari #RMF menggunakan komunikasi sosial media untuk merepresentasikan diri, pengorganisasian diri, dan interaksi dengan kelompok dialog di luar seperti media mainstream, administrasi universitas, dan penentang dari kampanye. Sebagai tambahan untuk komunikasi resmi dari pergerakan, pengguna biasa juga menggunakan tagar untuk menimbulkan diskusi dan untuk menanggapi komentar.<sup>xxxiii</sup>

Setelah kampanye #RMF, orang-orang melanjutkan dengan protes 'Fee Must Fall' (#FMF) yang dimulai sebagai jalan bagi mahasiswa untuk menyuarakan diri terkait dengan kenaikan biaya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Namun, Bosch juga

menambahkan bahwa protes harus dipertimbangkan pada latar belakang yang lebih luas dari pendanaan pemerintah yang menurun untuk pendidikan tinggi, bersama dengan ketidaksetaraan sosio-ekonomi yang meluas serta konflik rasial.<sup>xxxiv</sup> Selain itu, terlepas dari penciptaan ideal dari ruang-ruang yang memungkinkan diskusi bagi orang-orang untuk menyentuh isu-isu penting di Afrika Selatan, ketika ketegangan domestik meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi unjuk rasa jalanan yang menyebabkan bentrokan dan kecenderungan penggunaan kekerasan. Apabila dibandingkan dengan #RMF, kampanye #FMF menempatkan berbagai hal dalam perspektif—ukuran bijaksana—karena kampanye selanjutnya menarik sebanyak 1.3 juta tweet di Twitter namun dengan hampir hingga tanpa hasil yang berpengaruh dari perhatian luas. Ini merupakan kondisi yang disebut dalam buku cetak sebagai Slacktivism, atau konsep mengenai individu yang ‘berpartisipasi’ aktif dalam aktivisme sosial dengan mengeklik tombol. Kasus aktivisme digital di Afrika Selatan memperdebatkan bahwa situs jejaring sosial seperti Twitter lebih cocok untuk hiburan daripada pengorganisasian politik.<sup>xxxv</sup> Ini menambahkan wacana aktivisme digital di Afrika terutama dalam menarik perhatian anak muda. Sementara itu penting juga untuk menciptakan sarana tersebut, tanpa strategi jangka panjang, aktivisme dengan tujuan yang kurang jelas akan sangat mungkin memudar layaknya tren budaya belaka, bukannya menjadi komponen demokrasi dalam negara transisi.

## Aktivisme Digital di Korea Selatan

Aktivisme digital, atau yang didefinisikan oleh Kang sebagai aktivisme internet di Korea Selatan, dimulai pada tahun 2002. Orang-orang menggunakan internet untuk menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka setelah dua pelajar perempuan tanpa sengaja dibunuh oleh tentara Amerika Serikat.<sup>xxxvi</sup> Melalui internet, seluruh anak muda Korea Selatan berhasil menyatukan sekelompok besar orang-orang untuk memberikan perhatian yang besar—mengalihkan animo masyarakat yang tinggi pada Piala Dunia yang sedang berlangsung (yang bertempat di Jepang dan Korea Selatan) ke insiden ini. Harus dipahami bahwa aktivitas internet masyarakat di Korea Selatan sangat besar, tingkat engagement antarpenggunaannya sangat tinggi, termasuk di dalamnya keterlibatan politik. Korea Selatan memiliki sistem internet yang maju, dan selama beberapa waktu terakhir negara ini selalu berada di urutan teratas sebagai negara dengan kecepatan rata-rata internet paling cepat dibandingkan dengan negara lain.<sup>xxxvii</sup> Oleh karena itu, akibat dari paparan internet dan karena menjadi gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan dengan anak muda, internet tidak dilihat sebagai domain virtual tak terbatas yang terpisah dari tempat fisik yang sesungguhnya. Sebagai gantinya,

internet merupakan bagian dari pengalaman natural yang menyusun aktivitas online ke dalam bentuk kegiatan pribadi, interpersonal dan publik lainnya.<sup>xxxviii</sup>

Hampir seluruh warga negara Korea Selatan memiliki akses pada internet, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 82%.<sup>xxxix</sup> Meskipun demikian, walau kecepatan internet dan penetrasi tinggi, transparansi pemerintah dan keterlibatan demokratis tidak semaju teknologi mereka, penyebab yang sekarang sedang ditunjukkan oleh Aktivis Digital. Aktivisme digital di Korea Selatan dimulai terutama oleh anak muda, dan para remaja membawa praktik rutin online ke jalan ketika mereka mengedarkan pesan-pesan dan membuat pertunjukan yang menarik kelompok anak muda lainnya. Aktivis-aktivis digital ini membangun jaringan yang efisien dan aliansi sementara yang mengelilingi obyek-obyek keramaian dan menanggapi otoritas dengan aksi subversi yang kurang sopan.<sup>xli</sup>

Kemudian, di jalanan, praktik ini membangun mode partisipasi politik yang jelas yang bergerak melebihi permintaan dari demokratisasi kelembagaan, yang nantinya akan mengambil dampak politik yang lebih signifikan ketika tokoh-tokoh politik dan oposisi bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa internet besar-besaran terjadi lagi pada tahun 2008, dimana para aktivis muda menyuarakan kekecewaan mereka pada langkah-langkah Neoliberal yang dipaksakan dalam kesepakatan perdagangan baru antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Masalah pada kesepakatan perdagangan tersebut adalah persoalan impor 'sapi gila' dari Amerika Serikat ke Korea Selatan. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan janji untuk menuntut semua yang menyebarkan informasi palsu secara online beserta inisiator protes lilin. Reaksi tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah dan media mainstream menarik lensa interpretasi dari mobilisasi aktivis dan oposisi konservatif-progresif. Aktivis-aktivis digital ini, rupanya, tidak memberikan tanggapan dengan bahasa ideologi yang sama. Melainkan, kelompok ini meningkatkan aktivitas mereka dalam jangkauan dan keterhubungan baik online maupun di jalanan, mengalahkan pemerintah dengan keberadaan mereka, jaringan, dan sentuhan parodi.<sup>xlii</sup>

Protes lilin menjadi sebuah ciri khas dari aktivisme Korea Selatan, serupa dengan salah satu yang terjadi selama pendakwaan Park Geun Hye di tahun 2017. Orang-orang, terutama anak muda—digital natives Korea Selatan—dan mereka yang tinggal di era rezim pascaotoriter di negara itu lebih terbuka terhadap gagasan menyuarakan keprihatinan politik mereka. Sebagian besar mobilisasi warga negara yang dipimpin oleh aktivis digital Korea Selatan penuh damai dan satiris. Sementara pemerintah Korea Selatan masih menjunjung tinggi sifat yang lebih konservatif dalam pemerintahan, demokrasi menjadi nilai universal yang dimiliki oleh anak muda.

# Perbandingan Aspek-Aspek Aktivisme Digital



## ASPEK

## PERBANDINGAN

### STRATEGI

- Di Uni Eropa, aktivisme digital merupakan kasus dari isu spesifik yang hanya mewakili kepentingan dari kelompok tertentu.
- Media sosial banyak digunakan di Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Brazil namun cara juru kampanye menarik perhatian massa berbeda.
  - a.) Korea Selatan menggunakan otoritas subversi melalui humor media sosial dan keterikatan komunitas.
  - b.) Brazil pada dasarnya fokus pada membangun komunitas dan institusionalisasi kelompok aktivis ke dalam organisasi.
  - c.) Afrika Selatan menginisiasi sebuah platform non-institusionalisasi untuk menimbulkan debat menentang sisa-sisa sejarah kolonialisasi yang bukan merupakan subyek media *mainstream*.

### RESPON

Tidak ada pengukuran yang jelas. Namun, dampaknya dapat dilihat melalui reaksi dan tanggapan.

- Pemerintah Brazil menanggapi dengan inisiatif pengawasan lebih ketat yang berasal dari pemerintah, terutama kepada aktivis digital. Interaksi tersebut mengubah aktivitas internet dan dunia maya menjadi domain keamanan nasional.
- Di Korea Selatan, protes/unjuk rasa tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan generasi lebih tua yang memegang jabatan di pemerintahan tidak membatasi tindakan aktivisme digital.
- Pemerintah Uni Eropa telah membuat satu set aturan dan regulasi untuk mengajukan pandangan yang berlawanan agar diperhitungkan dalam perubahan parlemen. Ini menunjukkan bahwa tindakan aktivisme benar-benar untuk memenuhi tujuan mereka.
- Di Afrika Selatan, tanggapan datang dari media dalam menangkap wacana pascakolonial.
- Dalam kasus Uni Eropa, terlepas dari keragaman kelompok koalisi aktivis, mereka dapat dikategorikan sebagai 'bagian yang lebih tua' dari masyarakat sipil Uni Eropa.

## HASIL

Hasil dari aktivisme digital berbeda dengan jenis respon yang dipaksakan oleh pemerintah. Hasil yang dipicu lebih fokus pada efek sosial.

- Dalam kasus Afrika Selatan, pemindahan patung signifikan secara simbolis karena melanggengkan diskusi dan wacana tentang politik diskriminatif rasial di negara ini. Dalam kasus ini, sosial media digunakan untuk memfokuskan kembali dan mendorong keberadaan media mainstream.
- Pada level kebijakan, unjuk rasa yang bertempat di Afrika Selatan tidak memiliki tujuan jelas dalam mencapai jenis perubahan kebijakan yang dapat menguntungkan orang-orang dibandingkan dengan yang ada di Brazil, Uni Eropa, atau bahkan pendakwaan dari Presiden di Korea Selatan.
- Di Uni Eropa, dimana kebutuhan maksimalisasi kegunaan digambarkan, masalah ini menggema sebagai kepentingan rasional untuk kelompok tertentu dibandingkan dengan penyebab ideasional di Afrika Selatan, Korea Selatan dan Brazil.

## Kesimpulan

Dari studi kasus di atas, kita dapat melihat bahwa praktik dari aktivisme digital tersebar secara luas dalam skala global dan digunakan pada tingkat yang berbeda sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik dari setiap kawasan. Terdapat pula banyak variabel dan strategi, seperti yang digambarkan dengan aktivisme digital di Uni Eropa yang memiliki lebih banyak pendekatan tradisional daripada negara lain yang kita eksplorasi, karena tujuan mereka adalah perubahan kebijakan, yang bertentangan dengan perubahan struktur sosial atau budaya. Dapat dikatakan, hal tersebut masih merupakan gerakan ‘sukses’. Ketika berbicara tentang organisasi pergerakan sosial, tujuan dan konten memang penting.

Kita percaya mengenai pentingnya ruang politik alternatif yang diberikan oleh aktivisme digital. Namun sebagai sebuah platform baru, tentunya masih banyak sekali hal yang masih dapat terus dikembangkan dari aksi aktivisme digital. Terdapat banyak debat ilmiah yang menggarisbawahi perbedaan antara aktivisme digital dan aktivisme konvensional, tanpa menghiraukan keberadaan aktivisme digital yang masih dianggap sebagai subyek studi demokratis sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi seperti itu. Tidak ada formula yang tepat dan sama untuk semua kasus ketika membahas mengenai aktivisme digital dalam skala global,

karena masing-masing kawasan memiliki kekhasannya sendiri-sendiri yang juga kompleks. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk menyebarluaskan cara efektif menjadi seorang aktivis digital. Studi mengenai aktivisme digital juga harus diambil dari berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, kajian media dan komunikasi, serta studi seni dan desain—karena politik telah menjadi tidak pasti dan individual daripada sebelumnya.

Walaupun aktivisme digital tidak akan pernah menggantikan kegiatan politik ‘tradisional’, melalui studi kasus ini kita dapat melihat bagaimana aktivisme digital ini turut menggenapi perjuangan beberapa kelompok untuk mencapai tujuan politik. Dan, melalui tulisan ini, sudah jelas bahwa aktivisme digital menjadi mekanisme yang lebih populer untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan memiliki tempat tersendiri di dalam masyarakat yang demokratis.





# References

- <sup>i</sup> Van de Donk, W, Loader, B. D, Nixon, P. G & Rucht, D. (2004). *Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements*. Routledge: London.
- <sup>ii</sup> Mitu, B & Vega, D. O. C. (2014) Digital Activism: A Contemporary Overview. *Revista de Stiinte Politice*, 44, hal.103–112.
- <sup>iii</sup> Kaun, A & Uldam, J. (2017). Digital Activism: After the Hype. *New Media & Society*, 00(0), hal.1–8.
- <sup>iv</sup> Van Laer, J & Van Aeist, P. (2010).
- <sup>v</sup> Ibid.
- <sup>vi</sup> Kelley, P. (2013). Study Shines Light on What Makes Digital Activism Effective. [daring] University of Washington News. Tersedia di: <http://www.washington.edu/news/2013/11/20/study-shines-light-on-what-makes-digital-activism-effective/> [Diakses pada 30 Nov. 2017].
- <sup>vii</sup> Van de Donk, W, Loader, B. D, Nixon, P. G & Rucht, D. (2004).
- <sup>viii</sup> Harlow, S & Harp, D. (2013).
- <sup>ix</sup> Perri, J. (2017). How Killing Net Neutrality Will Hurt Online Protests and Free Speech. [daring] Mashable. Tersedia di: <http://mashable.com/2017/12/07/net-neutrality-digital-activism-free-speech/#tsEeyqW5fiqP> [Diakses pada 13 Des. 2017].
- <sup>x</sup> Ganesh, M. I. (2016). *The New Green: The Landscapes of Digital Activism*. Arrow for Change, 22(1), hal.2–6.
- <sup>xi</sup> Moeti, K. (2017). Digital Activism Comes of Age: Technology is Creating New Space for Marginalized Voices. [daring] Huffington Post. Tersedia di: [https://www.huffingtonpost.com/entry/digital-activism-comes-of-age-technology-is-creating\\_us\\_590b498ae4b046ea176ae884](https://www.huffingtonpost.com/entry/digital-activism-comes-of-age-technology-is-creating_us_590b498ae4b046ea176ae884) [Diakses pada 13 Dec. 2017].
- <sup>xii</sup> Van Laer, J & Van Aeist, P. (2010).
- <sup>xiii</sup> Statista (2016). Topic: Internet Usage in Brazil. [daring] [www.statista.com](http://www.statista.com). Tersedia di: <https://www.statista.com/topics/2045/internet-usage-in-brazil/> [Diakses pada 28 Nov. 2017].
- <sup>xiv</sup> Breuer, A. and Welp, Y. (2014). *Digital Technologies for Democratic Governance in Latin America*. 1st ed. New York: Routledge.
- <sup>xv</sup> Ibid.
- <sup>xvi</sup> Bainbridge, L. (2014). How Social Media Gives New Voice to Brazil's Protests. [daring] *The Guardian*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/27/social-media-gives-new-voice-to-brazil-protests> [Diakses pada 28 Nov. 2017].
- <sup>xvii</sup> Igarape Institute (2013). Black Block Rising: Social Networks in Brazil. Open Empowerment Note. Rio de Janeiro: Igarape Institute.
- <sup>xviii</sup> Muggah, R. (2015). A New Era of Digital Protest. [daring] Huffington Post. Tersedia di: [https://www.huffingtonpost.com/robert-muggah/a-new-era-of-digital-protest\\_b\\_4089763.html](https://www.huffingtonpost.com/robert-muggah/a-new-era-of-digital-protest_b_4089763.html) [Diakses pada 28 Nov. 2017].
- <sup>xix</sup> Camara Dos Deputados (2016). PL 215/2015 Inteiro teor Projeto de Lei. [daring] [Camara.gov.br](http://www.camara.gov.br). Tersedia di: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946034&ord=1> [Diakses pada 28 Nov. 2017].
- <sup>xx</sup> Breindl, Y. (2010). Internet-Based Protest in European Policymaking. *International Journal of E-Politics*, 1(1), hal.57–72
- <sup>xxi</sup> Sikkink, K. and Keck, M. (2014). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. 5th ed. Ithaca: Cornell University Press.

- xxii Breindl, Y. and Briatte, F. (2013). Digital Protest Skills and Online Activism Against Copyright Reform in France and the European Union. *Policy & Internet*, 5(1), hal.27–55.
- xxiii Ibid.
- xxiv Breindl, Y. (2013). Assessing Success in Internet Campaign. *Information, Communication & Society*, 16(9), hal.1419–1440.
- xxv Löblich, M. and Wendelin, M. (2012). ICT Policy Activism on a National Level: Ideas, Resources and Strategies of German Civil Society in Governance Processes. *New Media & Society*, 14(6), hal.899–915.
- xxvi Mueller, M., Pagé, C. and Kuerbis, B. (2004). Civil Society and the Shaping of Communication–Information Policy: Four Decades of Advocacy. *The Information Society*, 20(3), hal.169–185.
- xxvii Coy, P. (2009). *Consensus Decision Making, Northern Ireland and Indigenous Movements*. 2nd ed. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, hal.155–160.
- xxviii Wasserman, H. (2011). Mobile Phones, Popular Media, and Everyday African Democracy: Transmissions and Transgressions. *Popular Communication*, 9(2), hal.146–158
- xxix Bosch, T. (2016). Twitter Activism and Youth in South Africa: The Case of #RhodesMustFall. *Information, Communication & Society*, 20(2), hal.221–232.
- xxx Bickford, S. (2011). Emotion Talk and Political Judgment. *The Journal of Politics*, 73(4), hal.1025–1037.
- xxxi Garman, A. and Wasserman, H. (2013). Youth Participation. [online] Media and Citizenship Project. Tersedia di: <http://mediaandcitizenship.ru.ac.za/wp-content/uploads/2013/03/Youth-identity-studymajor-findings.pdf> [Diakses pada 30 Nov. 2017].
- xxxii Wasserman, H. (2011). Mobile Phones, Popular Media, and Everyday African Democracy: Transmissions and Transgressions. *Popular Communication*, 9(2), hal.146–158
- xxxiii Bosch, T. (2016). Twitter activism and youth in South Africa: the case of #RhodesMustFall. *Information, Communication & Society*, 20(2), hal.221–232.
- xxxiv Bosch, T. (2016). Twitter and Participatory Citizenship: #FeesMustFall in South Africa. In: B. Mustvairo, ed., *Digital Activism in the Social Media Era Critical Reflections on Emerging Trends in Sub-Saharan Africa*, 1st ed. London: Palgrave Macmillan, hal.159–161.
- xxxv Morozov, E. (2012). *The Net Delusion*. 2nd ed. London: Penguin, hal.170.
- xxxvi Kang, J. (2017). *Igniting the Internet: Youth and Activism in Postauthoritarian South Korea*. 1st ed. Honolulu: University of Hawaii Press
- xxxvii Fast Metrics (2017). Internet Speeds by Country - Fastest Internet In The World Map. [daring] [Fastmetrics.com](https://www.fastmetrics.com/internet-connection-speed-by-country.php#top-10-comparison-2017). Tersedia di: <https://www.fastmetrics.com/internet-connection-speed-by-country.php#top-10-comparison-2017> [Diakses pada 23 Nov. 2017].
- xxxviii Postill, J. (2011). *Localizing the Internet*. 1st ed. New York: Berghahn Books.
- xxxix Freedom House (2016). *South Korea: Freedom on the Net 2016*. [daring] [Freedomhouse.org](https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/south-korea). Tersedia di: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/south-korea> [Diakses pada 23 Nov. 2017].

- <sup>xI</sup> Petulla, S. (2013). In South Korea, Activists Say Transparency Must Catch Up to Technology. [daring] Tech President. Tersedia di: <http://techpresident.com/news/wegov/23538/south-korean-digital-activists-work-google-toward-digital-freedom> [Diakses pada 23 Nov. 2017].
- <sup>xII</sup> Kang, J. (2017). Internet Activism Transforming Street Politics: South Korea's 2008 'Mad Cow' Protests and New Democratic Sensibilities. *Media, Culture & Society*, 39(5), pp.750–761.
- <sup>xIII</sup> Ibid.

## Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences  
Universitas Gadjah Mada  
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor,  
Jalan Sosio Yustisia 1  
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone: (0274) 563362, ext. 116  
Email: [cfd.s.fisipol@ugm.ac.id](mailto:cfd.s.fisipol@ugm.ac.id)  
Website: [cfd.s.fisipol.ugm.ac.id](http://cfd.s.fisipol.ugm.ac.id)

